KERJASAMA TRILATERAL (INDONESIA, MALAYSIA, FILIPINA) MELALUI PROGRAM *ECOREGION CONSERVATION PLAN* (ECP) DI LAUT SULU-SULAWESI TAHUN 2006-2014

Oleh:
Prilia Ariesta Datuarrang
44312015

Skripsi ini dibawah bimbingan:
Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the Trilateral Cooperation (Indonesia, Malaysia, Philippines) through Ecoregion Conservation Plan (ECP) program in Sulu-Sulawesi Sea period 2006-2014. Within this cooperation there are Sub-Committees that directly implement the action of the Ecoregion Conservation Plan (ECP) is Sub-Committee on Sustainable Fisheries, Sub-Committee on Marine Protected Areas and Networks, and Sub-Committee on Threatened, Charismatic and Migratory Species. Author also analyzed the benefits of cooperation for each country, obstacles faced by Indonesia, Malaysia and Philippines, and the results of trilateral cooperation in the Sulu-Sulawesi Sea.

The research method using qualitative research methods. Most of the data were collected through observation, literature study, online data searches and documentation. The study was conducted at the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the library of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia.

The results showed that with the cooperation between Indonesia , Malaysia and the Philippines in Sulu-Sulawesi Marine since 2006 has given good results for individual countries such as fisheries management carried on an ongoing basis, and the cooperation is also a direct impact on people's lives around the living in the Sulu-Sulawesi Sea ecoregion.

Keywords: Cooperation, Indonesia, Malaysia, Philippines, Ecoregion Conservation Plan, Sulu-Sulawesi Sea

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (ECP) di Laut Sulu-Sulawesi tahun 2006-2014. Di dalam kerjasama ini terdapat tiga Sub-Komite yang secara langsung mengimplementasikan aksi dari *Ecoregion Conservation Plan* (ECP) yaitu Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Jejaring Kawasan Konservasi dan Sub-Komite untuk Pengelolaan Spesies Terancam Punah, Karismatik dan Peruaya. Peneliti juga menganalisa manfaat kerjasama bagi masing-masing negara, kendala yang dihadapi oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina, dan hasil dari kerjasama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan adalah melalui observasi, studi kepustakaan, penelusuran data online dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya kerjasama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi semenjak tahun 2006 telah memberikan hasil yang baik bagi masing-masing negara seperti pengelolaan perikanan dilakukan terus secara berkelanjutan serta kerjasama ini juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekitar yang tinggal di ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.

Keyword: Kerjasama, Indonesia, Malaysia, Filipina, *Ecoregion Conservation Plan*, Laut Sulu-Sulawesi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kondisi dunia internasional yang semakin rumit dan adanya sifat saling ketergantungan membuat setiap negara tidak mempunyai pilihan lain untuk tidak melakukan dan mengembangkan kerjasama internasional yang tetap berpedoman pada aspek kepentingan nasionalnya. Hubungan internasional merupakan suatu bentuk interaksi yang dilakukan antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang lain.

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Saat ini seiring dengan semakin kompleks dan dinamisnya dimensi hubungan internasional, yang kemudian memaksa bagi setiap aktor dan pihak internasional untuk bekerjasama dalam satu isu di sebuah kawasan yang kemudian menjadikan isu tersebut menjadi perubahan transnasional, dimana kemudian tidak dapat dielakkan terlibatnya aktor atau pihak lain untuk saling bekerjasama, walaupun di kawasan lain dari tempat terjadinya masalah tersebut (http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10#.VtzSoPl97Dd diakses pada 24 Februari 2016). Salah satu isu yang juga dibahas dalam studi hubungan internasional yaitu isu lingkungan hidup, dimana isu ini termasuk dalam isu yang sering diangkat dalam agenda internasional.

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua dasawarsa kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990. Kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan serta proses yang tepat –pembentukan rezim internasional– dalam dimensi lingkungan hidup. Lebih lanjut, proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses

dimana anggota rezim harus mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat rezim tersebut. Proses implementasi rezim ini terdiri dari tahap pertukaran data dan informasi, analisis data, serta penilaian terhadap proses implementasi yang telah dilakukan oleh negara anggota (Perwita & Yani, 2005 : 143-145).

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa isu lingkungan menjadi salah satu fokus penting dalam hubungan internasional. Yang pertama, beberapa masalah lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan global. Seperti emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim di seluruh dunia. Yang kedua, beberapa masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya yang dimiliki bersama. Contohnya jika pembuangan limbah dilakukan di laut perbatasan dua negara tentu dampaknya juga akan mengenai kedua negara tersebut. Yang ketiga, banyak masalah lingkungan yang sifatnya transnasional dan tak terikat oleh batas wilayah. Yang keempat, meskipun permasalahnnya hanya tingkat lokal, namun dialami lintas negara. Yang kelima, permasalahan lingkungan berkaitan juga dengan ekonomi-sosial maupun politik (Greene, 2001 : 387-414). Melihat berbagai alasan tersebut, ada banyak negara yang berkomitmen untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi isu lingkungan hidup. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan yaitu yang bergerak dalam bidang konservasi laut yang dilakukan secara trilateral oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi.

2. Rumusan Masalah

a. Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) Melalui Program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014?"

b. Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan minor, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014?
2. Apa manfaat dari kerjasama trilateral melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* bagi kepentingan nasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi?
3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam pelaksanaan kerjasama trilateral melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi?
4. Apa hasil dari kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* di Laut Sulu-Sulawesi?

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Pustaka

A. Hubungan Internasional

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri semangat sistem internasional *bipolar* dan berubah pada *multipolar* atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer (blok Barat – blok Timur) kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia ini. Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika

Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih fokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) kepada isu-isu *low politics* (misalnya, hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) yang dianggap sudah sama penting dengan isu *high politics* (Perwita & Yani, 2005 : 5).

Studi hubungan internasional mengalami banyak perkembangan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Studi yang awalnya hanya membahas mengenai politik internasional dan berfokus pada negara sebagai objek utama terus mengalami pergeseran dan lebih membuka diri bagi aktor *non-state* untuk ikut berperan dalam dunia internasional. Seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), IGO (*Inter-Governmental Organization*), MNC (*Multi-National Corperation*) bahkan individu juga memiliki *power* dan pengaruh yang kuat yang tidak dapat dikesampingkan. Aktor-aktor ini kemudian saling berinteraksi dan bekerjasama hingga terbentuk komunitas dan pola-pola interaksi tertentu (Sitepu, 2011 : 138).

Hubungan internasional merupakan hubungan interaksi antar bangsa yang melintasi batas negara. Adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang menjadi penghalang bagi para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut dapat meliputi hubungan antara satu negara dengan negara lain atau pun hubungan negara dengan aktor non-negara. Hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa, yang menyangkut hubungan di segala bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan bidang lainnya.

B. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005 : 35).

Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian tersebut dapat berupa hubungan bilateral maupun multilateral. Pada hakekatnya, dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memiliki peranan penting dalam kehidupan antar negara di dunia. Perjanjian internasional merupakan instrumen untuk menampung kehendak dan persetujuan negara-negara ataupun subjek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional sebelumnya akan melalui perumusan hukum internasional untuk kemudian mengatur jalannya kegiatan antar negara yang bersangkutan.

Produk dari kerjasama internasional yakni ditandatanganinya sebuah perjanjian internasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian internasional. Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut,

Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

2. Kerangka Pemikiran

Setiap aktor negara pasti akan melakukan interaksi dengan aktor lainnya dalam hubungan internasional guna untuk menjalin hubungan. Hal tersebut pasti terjadi mengingat suatu negara tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Dibutuhkan adanya suatu hubungan antara satu negara dengan negara lain untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dalam hubungan internasional ada pula yang disebut dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Dalam kerangka hubungan internasional, kepentingan nasional dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional seperti halnya yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi.

Karena itulah timbul hubungan yang terjadi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan tiga negara yang secara geografis saling berbatasan antara satu sama lain. Karena jarak antara ketiga negara yang terbilang cukup dekat, maka tidak heran jika ada wilayah dari ketiga negara yang posisinya masuk kedalam wilayah jurisdiksi dari Indonesia, Malaysia dan Filipina. Salah satunya adalah posisi Laut Sulu-Sulawesi yang wilayahnya masuk kedalam teritorial Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu dari sekitar 200 ekoregion penting yang ada di dunia, dengan kekayaan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi yang posisinya terletak pada puncak dari segitiga karang dunia (*coral triangle area*). Mengingat Laut Sulu-Sulawesi merupakan wilayah perairan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi, membuat Indonesia, Malaysia dan Filipina berinisiatif untuk melindungi segala keanekaragaman hayati yang terdapat dalam Laut Sulu-Sulawesi. Mulai dari pengelolaan hingga pencegahan terhadap isu-isu yang dapat merusak Laut Sulu-Sulawesi.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan numeral berdasarkan prosedur statistik. Penelitian dalam metode ini menyoroti kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Merujuk pada penelitian yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Malaysia Untuk Indonesia, dan Kedutaan Besar Filipina Untuk Indonesia yang kemudian di implementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

2. Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan *Purposive*, yaitu peneliti menentukan pihak-pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Adapun pihak yang peneliti jadikan sebagai informan adalah sebagai berikut :

1. Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
2. Staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
3. Staf Kedutaan Malaysia untuk Indonesia.

4. Staf Kedutaan Filipina untuk Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina melalui program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014, apa saja manfaat kerjasama trilateral ini bagi kepentingan nasional masing-masing negara di Laut Sulu-Sulawesi, kendala yang dihadapi oleh ketiga negara dalam pelaksanaan kerjasama ini serta hasilnya dengan mengolah data-data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

4. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan uji keabsahan data yang peneliti gunakan untuk menguji validitas dari data yang diperoleh guna mengkomparasikan data-data yang didapat di lapangan serta data yang diperoleh dari literatur. Untuk menguji data yang diperoleh tentang Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) melalui Program *Ecoregion Conservation Plan* (*ECP*) di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014 peneliti selain menggunakan studi literatur dan studi pustaka, peneliti juga melakukan wawancara. Untuk menguji keabsahan data tersebut maka peneliti mencoba mencari informan baik dari pihak Indonesia, Malaysia, dan Filipina agar data yang diperoleh valid.

a. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara dihubungkan dengan teori atau konsep sebagai pijakan peneliti sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Penyajian data, peneliti menyajkan data-data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara atau dari sumber-sumber internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau sekunder yang didapatkan dari informan yakni pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pihak Kedutaan Malaysia untuk Indonesia, dan pihak Kedutaan Filipina untuk Indonesia.

b. Rencana Pengumpulan Data

Rencana pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel

Rencana Pengumpulan Data

No	Data Yang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1.	Latar Belakang Kerjasama Trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) di Laut Sulu-Sulawesi	Studi Pustaka	1. Buku 2. Internet
		Wawancara	1. Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 3. Staf Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia 4. Staf Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia
	Upaya atau program apa saja yang dilakukan dalam Kerjasama	Studi Pustaka	1. Buku 2. Internet

	Trilateral di Laut Sulu-Sulawesi Tahun 2006-2014	Wawancara	1. Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Staf Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 3. Staf Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia 4. Staf Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia
	Kendala yang dihadapi dalam kerjasama Trilateral di Laut Sulu Sulawesi, Manfaat Kerjasama bagi kepentingan nasional masing-masing negara di Laut Sulu-Sulawesi	Wawancara	1. Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Staf Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia 3. Staf Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia
	Kondisi Laut Sulu-Sulawesi 2006-2014	Studi Pustaka	1. Buku 2. Internet
		Wawancara	1. Staf Kementerian Kelautan dan Perikanan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Objek Penelitian

Tinjauan Umum Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudera, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Degan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papuan dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India (http://indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/geografi-indonesia diakses pada 14 Juni 2016).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km dengan luas wilayah laut 5,4 juta km, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km. Potensi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati kelautan terbesar.

Klasifikasi potensi tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbaharukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*); dan sumber daya tidak terbaharukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral.

Potensi yang tak kalah hebatnya adalah terumbu karang Indonesia merupakan yang terkaya di dunia. Diperkirakan dari total luas terumbu karang di dunia yang mencapai 284.300 km, 18% (85.200 km) diantaranya berada di wilayah Indonesia. Terumbu karang Indonesia juga termasuk dalam wilayah segitiga karang dunia (*coral triangle*) yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia. Segitiga karang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Total luas terumbu karang di *coral triangle* sekitar 75.000 km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011 : 6-8).

Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Secara konseptual, kebijakan luar negeri Indonesia selalu dikaitkan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagaimana telah lama diungkapkan Mohammad Hatta. Bebas berarti bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub dominan kekuatan dunia. Sementara aktif memiliki arti ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia. Konsepsi dan prinsip babs aktif ini secara ideal sejatinya bertujuan menegaskan komitmen Indonesia terhadap pelaksanaan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, serta menunjukan komitmen Indonesia menunaikan instruksi UUD 1945 dalam rangka turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (http://interseksi.org/report/membaca-kebijakan-luar-negeri-sby-dan-jokowi/ diakses pada 18 Agustus 2016).

Prinsip bebas aktif telah menjadi prinsip tunggal kebijakan luar negeri Indonesia sejak masa kemerdekaan. Dengan situasi regional dan global saat ini, Indonesia menghadapi tantangan untuk untuk menentukan arah pelaksanaan prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya agar dapat tetap melayani kepentingan nasional. Dalam penerapan prinsip tersebut, kepentingan nasional akan selalu menjadi tujuan utama sehingga setiap kebijakan luar negeri dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan kepentingan nasional tersebut, ASEAN akan tetap menjadi acuan dalam pencapaian dan peran Indonesia secara regional dan internasional. Selain itu, Indonesia juga senantiasa mempertahankan dan memperkuat kerjasama internasional yang telah terbangun baik dalam isu seperti terorisme, pembangunan berkelanjutan, operasi pasukan penjaga perdamaian maupun isu-isu internasional lainnya (http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/bebas-aktif.aspx diakses pada 18 Agustus 2016).

Di wilayah perairan Indonesia, kawasan ini meliputi tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana di dalamnya terdapat 17 Kabupaten/Kota yang masuk kedalam wilayah perairan SSME Indonesia, yaitu :



Sumber : Buku Profil *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion*

Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi merupakan bagian penting dari kawasan segitiga terumbu karang (*Coral triangle*) yang dikelilingi oleh pulau-pulau yang beragam luasnya yang tersebar dalam wilayah ketiga negara tersebut dengan tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Hutan mangrove, hamparan padang lamun, terumbu karang, dan perairan pantai dan lepas pantai yang kaya dengan berbagai spesies khas daerah

tropis. Tidak kurang dari 1.200 jenis ikan, 476 jenis karang, 400 spesies alga laut, 22 jenis mamalia laut (paus dan lumba-lumba), 16 spesies lamun dan 5 dari 7 spesies penyu terdapat di kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi ini. Disamping itu, diperkirakan ada sekitar 50 juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan ekoregion ini yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya yang ada di kawasan tersebut.

Selain kekayaan sumberdaya hayati, dalam kawasan tersebut juga tumbuh keanekaragaman budaya dan ilmu pengetahuan. Tidak kurang terdapat 50 kelompok etno-linguistik di sepanjang pantai ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Kenyataan bahwa berbagai spesies yang hidup di laut memiliki sifat peruaya (migrasi) tanpa mengenal batas administrasi suatu negara, serta sifat alami perairan laut yang terhubung antara satu dengan lainnya yang memungkinkan pengaruh dari satu tempat bisa berpindah dan berdampak ke tempat lainnya secara mudah tanpa bisa dibatasi melalui pendekatan batasan administratif semata. Hal ini lah yang menjadi salah satu dasar pemikiran pentingnya mengelola suatu ekoregion secara terpadu tanpa terlalu dibatasi oleh batasan-batasan administratif yang terlalu kaku, meskipun secara yuridis pengelolaan suatu ekoregion akan tetap menjadi kewenangan negara masing-masing sesuai dengan wilayah teritorial serta berdasarkan hukum yang berlaku di dalamnya.

Ancaman Terhadap Sumberdaya di Kawasan Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi

Disamping besarnya potensi sumberdaya yang terkandung di kawasan tersebut, pada kenyataannya pola pemanfaatan sumberdaya yang berkembang saat ini merupakan ancaman yang serius bagi kawasan ekoregion laut ini. Ditambah lagi, pendekatan dan inisiatif konservasi yang ada sekarang ini dipandang kurang dapat mengatasi ancaman yang terjadi pada area skala besar. Oleh karena itu, inovasi di bidang konservasi diperlukan untuk mengurangi ancaman dan untuk mempertahankan atau mengembalikan keanekaragaman hayati dalam skala regional. Dengan kata lain, perlindungan terhadap ekoregion laut Sulu Sulawesi seluas lebih dari satu juta kilometer persegi yang termasuk kedalam wilayah Indonesia, Malaysia dan Filipina ini akan berdampak positif pada kehidupan ekonomi masyarakat yang menempati wilayah tersebut.

Inisiatif Kerjasama Regional *Sulu Sulawesi Marine Ecoregion*

Berkaca dari besarnya potensi keanekaragaman hayati sumberdaya alam laut di wilayah ekoregion Sulu-Sulawesi serta potensi ancaman kerusakannya akibat pemanfaatan yang tidak bijaksana, telah membawa pemahaman bersama ketiga negara untuk bersama-sama mengelola kawasan tersebut secara terkoordinasi. Inisiatif ini mendapat dukungan yang sangat kuat dari mitra, antara lain *World Widlife Fund*, *Conservation International*, dan *The Nature Conservancy*.

Atas dasar visi bersama ketiga negara untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang bersifat lintas batas seperti yang dikemukakan di atas, dan dengan semangat untuk mengelola sumberdaya di kawasan Laut Sulu-Sulawesi serta komitmen agar upaya konservasi di kawasan tersebut berjalan dengan baik, para pemangku kepentingan di Indonesia, Malaysia dan Filipina telah sepakat untuk bekerja sama dalam suatu mekanisme yang inovatif untuk mengatasi hambatan-hambatan kerjasama dibawah dinamika politik dan lingkungan budaya yang berbeda dari ketiga negara tersebut.

Tingkat Regional

Tri-National Committee merupakan lembaga tertinggi didalam

kerjasama SSME. Kepemimpinan *Tri-National Committee* beserta sekretariat regional SSME berotasi setiap 2 tahun sekali berdasarkan urutan abjad. Indonesia menjadi negara pertama yang ditunjuk menjadi Ketua/*Chair* dari *Tri-National Committee* untuk periode tahun 2006-2007, selanjutnya Malaysia (2007-2009) dan Filipina (2009-2011). Indonesia kembali ditunjuk menjadi Ketua dari *Tri-National Committee* untuk periode 2011-2013. Pembahasan di tingkat *Tri-National Committee* dilakukan setiap 2 tahun sekali di negara yang menjadi Ketua/*Chair Tri-National Committee.*

Setiap negara yang menjadi ketua dari *Tri-National Committee* memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pelaksanaan *Ecoregion Conservation Plan* (ECP) di ketiga negara serta memfasilitasi penyelenggaraan kesekretariatan regional secara internal maupun kerjasama dengan pihak luar. Pertemuan regional tiga negara (*Tri-National Committee Meeting*) yang dilaksanakan setiap dua tahun merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi SSME.

2. Analisa Hasil Uji Validitas & Realibilitas

Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian atau informan sangatlah penting bahkan menjadi kunci utama. Sebab, subyek penelitian adalah orang yang benar-benar memahami dan tahu betul karena keterlibatannya dalam suatu penelitian, serta mendukung peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang nantinya data tersebut akan diolah, dianalisis, dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti memastikan dan memutuskan siapa yang dapat memberikan informasi yang relevan sehingga mampu menjawab pertanyaan peneliti.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti telah memperoleh data dari berbagai sumber yang dilakukan melalui studi pustaka berupa tulisan atau artikel, penulusan data online berupa data yang berasal dari situs-situs tertentu, metode dokumentasi berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen, dan sebagainya dengan melakukan studi lapangan ke lembaga terkait. Untuk menguji validitas dan realibilitas data yang telah diperoleh peneliti mengakses situs-situs resmi pemerintah dan lembaga serta mengkonfirmasi ke lembaga terkait yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku pihak Indonesia yang menandatangani *Memorandum of Understanding* dalam kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya Yang Dilakukan Oleh Indonesia, Malaysia, Dan Filipina Melalui Program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)*

Kerjasama Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam kerangka *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME) sudah terjalin sejak ditandatanganinya *Memorandum of Understanding on the Adoption of the Ecoregion Conservation Plan* pada tanggal 23 Februari 2006.

Dalam kerjasama trilateral yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, banyak upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan usaha konservasi yang dilakukan di ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Berbagai macam pertemuan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekoregion Laut Sulu-Sulawesi yang kemudian hasilnya diimplementasikan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina selama kerjasama

trilateral ini berjalan. Seperti halnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tiga Sub-Komite yang secara langsung mengimplementasikan program *Ecoregion Conservation Plan (ECP).* Ketiga Sub-Komite yang dibentuk oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam kerjasama ini yaitu Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (*Sub-Committee on Sustainable Fisheries*), Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Jejaring Kawasan Konservasi (*Sub-Committee on Marine Protected Areas and Networks*), dan Sub-Komite untuk Pengelolaan Spesies Terancam Punah, Karismatik dan Peruaya (*Sub-Committee on Threatened, Charismatic and Migratory Species*).

4. Hasil Dari Kerjasama Trilateral Antara Indonesia, Malaysia Dan Filipina Melalui Program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* Di Laut Sulu-Sulawesi

Kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina sudah berjalan sejak diadakannya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh ketiga negara. Sudah begitu banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan sejak tahun 2006, baik pertemuan yang dilakukan oleh badan tertinggi dari kerjasama ini yaitu *Tri-National Committee* dan juga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tiga Sub-Komite yang kemudian menghasilkan berbagai bentuk kesepakatan yang kemudian diimplementasikan oleh masing-masing Sub-Komite.

Ecoregion Conservation Plan (ECP) adalah aksi yang dilakukan oleh tiga Sub-Komite dalam kerangka kerjasama *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME). Tiga Sub-Komite SSME adalah Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Jejaring dan Sub-Komite untuk Pengelolaan Spesies Terancam Punah Karismatik dan Peruaya. Ketiga Sub-Komite ini memiliki aktifitasnya masing-masing yang telah disepakati dalam setiap pertemuan Sub-Komite.

Capaian-capaian yang terjadi di wilayah cakupan dari ekoregion Laut Sulu-Sulawesi yaitu kerjasama trilateral ini menghasilkan berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk pengelolaan konservasi dan sumber daya perikanan di ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Dalam kurun dekade terakhir, jumlah produksi perikanan tangkap di negara-negara kawasan Laut Sulu-Sulawesi adalah sebesar $53x10^6$ ton atau mengalami peningkatan 10 kali lipat dibandingkan pada tahun 1950-an. Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap ini terjadi setelah kerjasama di kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi antara Indonesia, Malaysia dan Filipina berjalan. Hal ini menunjukan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan dari sebelum terjadinya kerjasama hingga terjadinya kerjasama.

Karena sistem kelola ekoregion yang baik dari kerjasama trilateral ini, Kawasan Konservasi Laut Berau yang merupakan cakupan wilayah ekoregion Laut Sulu-Sulawesi menjadi objek studi pada keanekaragaman hayati laut dari lembaga lain seperti Geourge Washington University (Amerika), Wisconsin University (Amerika), Kyushu University (Jepang), Pemda/DPRD Alor-Solor (NTT), Taman Nasional Teluk Cendrawasih (Papua), Universitas Mulawaran (Samarinda), Universitas Udayana (Bali), Wageningen University (Belanda).

Berau juga dijadikan sebagai model pengembangan dan penilaian valuasi

ekonomi kelautan di pulau-pulau kecil di Indonesia. Taman Nasional Bunaken yang juga merupakan cakupan dari ekoregion Laut Sulu-Sulawesi diusulkan sebagai *Marine World Heritage Site*, Tubbataha Reefs Natural Park hampir 200% wilayahnya diperluas dan menjadi *World Heritage Site*, stok ikan pelagis kecil di wilayah ekoregion Laut Sulu-Sulawesi berada dalam kondisi yang sehat, melimpah dan dieksploitasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik satu kesimpulan mengenai kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi melalui program *Ecoregion Consevation Plan (ECP)* sudah terjalin sejak ditandatanganiya *Memorandum of Understanding on the Adoption of the Ecoregion Conservation Plan* yang menandai secara resmi kerjasama tiga negara dalam pengelolaan konservasi dan sumberdaya perikanan di kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Kerjasama ini berjalan karena adanya kesadaran dari ketiga negara untuk menjaga dan mengelola keanearagaman hayati yang tinggi di kawasan ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk merealisasikan program *Ecoregion Conservation Plan* (ECP) dengan membentuk tiga Sub-Komite yang mengimplentasikan aksi konservasi tersebut. Ketiga Sub-Komite itu adalah Sub-Komite untuk Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Sub-Komite untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut dan Jejaring Kawasan Konservasi serta Sub-Komite untuk Pengelolaan Spesies Terancam Punah, Karismatik dan Peruaya. Manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam kerjasama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi ini adalah dengan adanya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ketiga negara yang bermukim di sekitar wilayah ekoregion Laut Sulu-Sulawesi. Selain itu, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kontribusi perikanan ke perekonomian nasional dan juga meningkatkan kontribusi ekonomi ke masyarakat sekitar dikarenakan sejak kurun dekade terakhir atau sejak kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini berjalan, jumlah produksi perikanan tangkap di negara-negara kawasan Laut Sulu-Sulawesi adalah sebesar $53x10^6$ ton atau mengalami peningkatan 10 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan tahun 1950an.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terhadap kerjasama trilateral (Indonesia, Malaysia, Filipina) di Laut Sulu-Sulawesi melalui program *Ecoregion Conservation Plan (ECP)* tahun 2006-2014 ini adalah sebagai berikut:

Saran untuk Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina

Pertama, karena kerjasama ini dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina maka ketiga negara ini harus mampu untuk saling berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang dilakukan dalam kerjasama ini bisa lebih maksimal lagi.

Saran untuk Penelitian selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ke berbagai sumber yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan data yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama

Asian Development Bank. 2011. *Comprehensive Action Plans Of The Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion: A Priority Seascape Of The Coral Triangle Initiative*. Philippines : Asian Development Bank

Burchill, Scott dan Linklater Andrew. 2009. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Nusa Media

Dewobroto, dkk. 1995. *Kamus Konservasi Sumber Daya Alam*. Jakarta : Rineka Cipta

Greene, Owen. 2001. *Environmental Issues*, in: John Baylis & Steve Smith (eds.) *The Globalization of World Politics*, 2nd edition. Oxford, pp. 387-414

Indrawan, Mochamad, dkk. 2007. *Biologi Konservasi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Jackson, Robert H. Dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2012. *Buku Profil Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion*

Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : PT. Alumni

Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi Pertama*. Bandung : PT. Alumni

_____. 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua*. Bandung : PT. Alumni

Noel, Jose B. (eds.). 2003. *Conservation Plan For The Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion: Stakeholders Of SSME, Technical Working Groups Of Indonesia, Malaysia, And The Philippines, And The WWF-SSME Conservation Program Team.* WWF-SSME Program, Philippines

O'Neill, Kate. 2009. *The Environment and International Relations*. New York : Cambridge Press

Parthiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Mandar Maju

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Rachmawati, Iva. 2012. *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Rudy, Teuku May. 2002. *Hukum Internasional I*. Bandung : Refika Aditama

_____ . 2005. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung : Refika Aditama

_____ . 2011. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global*. Refika Aditama : Bandung

Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Steans, J. *et al*., 2010. *Introduction to International Relations: Perspective and Themes*. New Jersey: Pearson Prentice Hall

Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Supriatna, Jatna. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Penerbit Andi

JURNAL DAN KARYA ILMIAH :

Budianto, 2008. *Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*. Universitas Diponegoro

Gunawan, Boyke. 2014. *Kerjasama Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Laut Sulu-Sulawesi Melalui Program Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*. Universitas Padjadjaran

Lutfi Jamilatul Wardah, Siti. 2014. *Peran World Wild Fund For Nature (WWF) Dalam Program Heart Of Borneo (HOB) Di Indonesia Periode 2012-2013*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Muliandari, Natasya. 2011. *Implementasi WWF Coral Triangle Program Dalam Melestarikan Ekosistem Kawasan Segitiga Terumbu Karang Pada 2008-2010*. Universitas Katolik Parahyangan

DOKUMEN :

Bahan Presentasi Progress SSME Kementerian Kelautan dan Perikanan

Final Country SSME Report Indonesia, Malaysia, Philippines 2014

Laporan Program Aksi Strategis Regional Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan SSME Tahun 2013.

Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi.

Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Peraturan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UNDP Project Document. *Implementation Of The Sulu-Celebes Sea Sustainable Fisheries Management Project.*